

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku – buku :**

- Basuki, Sulistyono, Kamus Istilah Kearsipan, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- Budiman, Muhammad Rosyid, *Dasar Pengelolaan Arsip Elektronik*, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Yogyakarta, 2009.
- Fakhirah, Efa Laela, 2017, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Budi, 2000, *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*, PT. Insan Komunikasi, Bandung.
- Saidikin, Ok, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soebekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanintjo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutantje, Retnowulan, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 612).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012).

#### **Jurnal/Artikel/Tesis/Disertasi :**

Arsip Nasional Republik Indonesia, 1999, *Modul Manajemen Arsip Dinamis I*, ANRI, Jakarta.

Dewi, Indah Kusuma, 2015, “*Kajian tentang Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik terkait Ketentuan Mengenai Cyber Notary*”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hanafi, Adhya, 2017, “*Urgensi Penyimpanan Akta Otentik dalam Bentuk Dokumen Elektronik di Kabupaten Bantul*”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hippy, Karmila, *Implikasi Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik terkait Ketentuan Cyber Notary terhadap Tata Kearsipan*, Tesis, Program Studi Kenotariatan (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Maharddhika, Ida Bagus Gede Mahadiptha Bramartha, 2014, “*Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Digital menuju Era Cyber Notary*”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### **Internet :**

<http://daryono.staff.uns.ac.id/2011/12/22/pengelolaan-arsip-berbasis-elektronik>, diakses pada tanggal 1 September 2017.